

INTISARI

Tulisan ini merupakan kajian tentang peran teknologi informasi yang digunakan oleh KPU, fokus penelitian ada pada kebijakan penggunaan teknologi informasi pada salah satu tahapan penyusunan daftar dan pemutakhiran data pemilih menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Tujuannya adalah ingin mengetahui bagaimana dinamika yang dihadapi Sidalih dan bagaimana kebijakan publik mempengaruhi Sidalih dalam menghadirkan daftar pemilih yang inklusif, akurat, dan mutakhir.

Sidalih adalah hasil dari perumusan kebijakan publik yang diimplementasikan pada Pemilu 2014 merupakan jawaban KPU terhadap tuntutan publik akan kualitas daftar pemilih yang lebih baik, belajar dari pengalaman sebelumnya pada Pemilu 2009 yang paling mendapat sorotan publik. Namun dari Pemilu ke Pemilu, daftar pemilih selalu menjadi gugatan terutama dari pihak yang mengalami kekalahan dalam Pemilu, sehingga kemampuan Sidalih dipertanyakan.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, berlokasi di KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota sebagai implementor. Lebih lanjut penelitian ini kemudian mengelaborasi beberapa konsep tentang kebijakan publik (*public policy*). Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat, yang menunjukkan bahwa upaya Sidalih dalam menyusun daftar dan memutakhirkan data pemilih yang inklusif, akurat, dan mutakhir sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan publik yang telah melalui proses agenda setting, formulasi kebijakan, dan implementasi kebijakan tersebut disusun, baik itu kebijakan yang datang dari internal KPU sendiri maupun eksternal.

Sehingga, kajian ini merumuskan rekomendasi atas kebijakan Sidalih dari sisi kelembagaan juga teknis agar dapat lebih meningkatkan daftar pemilih yang inklusif, akurat, dan mutakhir.

Kata kunci : sidalih, kebijakan publik, daftar pemilih, teknologi informasi

ABSTRACT

This paper is a study about the role of information technology used by KPU, the focus of research is on the policy of using information technology at one of the stages of compiling a list and updating voter data using the Voter Data Information System (Sidalih). The aim is to find out how the dynamics facing Sidalih and how public policies affect Sidalih in presenting an inclusive, accurate, and up-to-date voter list.

Sidalih is the result of the formulation of public policies implemented in the 2014 Election, which is the KPU's response to public demands for a better quality voter list, learning from previous experiences in the 2009 Elections that received the most public scrutiny. But from election to election, the voter list has always been a lawsuit, especially from those who suffered defeat in the election, so that the ability of Sidalih is questioned.

By using descriptive qualitative research methods, located in the KPU RI and KPU Kabupaten/Kota as the implementor. Furthermore, this research then elaborates on several concepts of public policy. The results of this study found several supporting and inhibiting factors, which indicate that Sidalih's efforts in compiling lists and updating voter data that are inclusive, accurate, and up-to-date are strongly influenced by how public policies that have gone through the agenda-setting process, policy formulation, and The implementation of the policy was compiled, both policies that came from KPU's own internal and external.

Thus, this study formulates recommendations for Sidalih's policy from an institutional as well as a technical point of view to further enhance the list of voters that are inclusive, accurate, and up-to-date

Keywords : Sidalih, Public Policy, Voter List, Information Technology